

SINAR HARAPAN

Rabu, 9 Agustus 2006

Lumpur Panas Lapindo Terus Meluap Jalan Surabaya-Malang Terancam Putus

Oleh
Chusnun Hadi

Sidoarjo - Jalur utama Surabaya–Malang, Provinsi Jawa Timur (Jatim) terancam putus menyusul terus meluapnya lumpur panas dari area pengeboran Lapindo Brantas Inc.

Jalan Tol Porong–Gempol telah ditutup total sejak Selasa (8/8) dini hari. Sedangkan jalan bawah (reguler) juga terancam luberan lumpur yang semakin meninggi.

Pengamatan SH di lapangan, lumpur di sekitar Desa Siring dan Jatirejo kian meluap sampai di bibir rel kereta api. Tanggul penahan lumpur setinggi tiga meter hanya berjarak sekitar dua meter dari bibir rel. Jika sampai tanggul jebol dipastikan rel kereta api terendam sekaligus meluber ke jalan utama Surabaya-Malang.

Sejak pukul 06.00 WIB, arus lalu lintas baik dari arah Surabaya menuju Malang maupun sebaliknya mulai macet sebagai penutupan total jalur tol Porong-Gempol tengah malam tadi. Sedangkan jalan alternatif melalui Waru-Taman-Bypass Krian-Tarik-Mojokerto-Ngoro–Japanan, jaraknya bisa sampai dua kali lipat. Pengguna jalan alternatif ini pun tidak bisa leluasa, karena saat ini sedang ada perbaikan jembatan Ngrame, Mojokerto, sehingga kendaraan harus antre satu-satu.

Bupati Sidoarjo Wien Hendrarso sebenarnya tidak setuju dengan penutupan jalur tol, karena akan berpengaruh terhadap perekonomian Jawa Timur secara umum. Sebab jalur tol tersebut merupakan salah satu penggerak roda ekonomi Jawa Timur. “Saat jalur tol ditutup total beberapa saat lalu, arus transportasi pengiriman barang sangat terganggu,” kata Wien.

Sementara itu, untuk menyelamatkan rel kereta api agar tidak terendam rembesan lumpur, Lapindo Brantas Inc menyiapkan empat diesel untuk menyedot air ke penampungan lumpur di balik tanggul. “Kami akan terus menyedot air rembesan agar tidak sampai menenggelamkan rel kereta api,” kata Suratman, operator dan penjaga diesel penyedot.

Sedangkan petugas pos perlintasan kereta api terus melakukan aba-aba saat kereta api akan lewat, agar mengurangi kecepatannya. “Meski belum tersentuh lumpur, kami khawatir tanah di bibir rel mulai lapuk karena tergenang air. Karena itu kami beri aba-aba agar kereta api mengurangi kecepatan,” kata Ahmadi, petugas pos perlintasan kereta api.

Keputusan PT Jasa Marga cabang Surabaya–Gempol untuk menutup total jalur tol Porong-Gempol karena di jalur tersebut sangat membahayakan para pengguna jalan. Sebab ketinggian lumpur sudah berada empat hingga lima meter dari permukaan tol. Sedangkan tanggul penahan lumpur semakin rapuh menahan desakan lumpur yang semakin tinggi.

Menurut Kepala PT Jasa Marga Cabang Surabaya-Gempol, Ir Bachriansyah, pihaknya akan melakukan evaluasi tentang kekuatan tanggul. Untuk melakukan evaluasi ini, pihaknya bekerja sama dengan Institut Teknologi Surabaya (ITS).

Walhi Menolak

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur menolak pembuangan air lumpur Lapindo Brantas Inc ke laut, meski telah melalui water treatment. Pembuangan air lumpur dikhawatirkan menimbulkan masalah lingkungan hidup yang sangat serius.

Penolakan Walhi Jatim ini terkait dengan pernyataan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar, saat mengunjungi Porong, Rabu (2/8) lalu. Saat itu Rachmat menyatakan bahwa air lumpur Lapindo bisa dibuang ke laut setelah melalui proses treatment. Lapindo diminta membangun jaringan pipa sepanjang sekitar 17 kilometer ke arah laut.

“Pembuangan air lumpur ke laut bukannya untuk mengatasi masalah, namun akan menambah masalah baru. Saya khawatir kerusakan lingkungan semakin lebar,” kata Direktur Walhi Jatim, Ridho Syaiful Ashadi, dalam Seminar “Mencari Solusi Penanggulangan Banjir Lumpur Porong”, di Sidoarjo, Senin (7/8) siang.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Elfian Effendi di Jakarta, Senin siang mengatakan, kerugian akibat lumpur panas di Porong Sidoarjo, diperkirakan bisa mencapai Rp 33,27 triliun.

Menurut Elfian, data itu didapatkan setelah pihaknya melakukan eskalasi dampak turunan bencana tersebut dalam jangka menengah dan panjang. Seperti kerugian-kerugian yang bersifat “segera” diselesaikan, meliputi biaya penanganan sosial dan pembersihan lumpur bisa mencapai Rp 7,96 triliun. Belum lagi biaya yang sifatnya “sudah terjadi” seperti hancurnya sistem ekologi, diperkirakan mencapai Rp 4,63 triliun.

Sementara itu, Gubernur Lemhanas Muladi mengemukakan dua pernyataan Bagir Manan mengenai kasus lumpur panas Lapindo serta kasus korupsi. Atas pernyataan Ketua Mahkamah Agung (MA) tersebut, Muladi meminta Bagir mengundurkan diri saja dari jabatannya.

“Sudah menjadi kewajiban pihak Lapindo untuk mengganti rugi, namun juga harus tetap ditindak orang yang menyebabkan terjadinya lumpur panas tersebut. Jadinya, siapa saja orang Lapindo yang harus dihukum tetap harus dihukum. Sebagai Ketua MA harusnya Bagir berhati-hati, berkomentar soal Lapindo,” kata Muladi di Mabes Polri, Senin (7/8) siang.

(sulung prasetyo/maya handhini)